



Article Informations
Corresponding Email:
aqmelliarrrrr@gmail.com

Received: 03/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENGAMBILAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN TAHUN 2021-2023

Aqmellia Tanzillah¹⁾, Yuswari O. Djemat²⁾, Taufan H. Akbar³⁾

¹²³⁾Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Amerika Serikat ikut terlibat di tengah memanas nya konflik Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2021 dikarenakan sikap agresif Tiongkok di kawasan, AS terlibat melalui kebijakan luar negerinya, yaitu *Pivot to Asia*. Kebijakan tersebut ditempuh melalui proses pengambilan keputusan luar negeri AS yang dianalisis melalui faktor-faktor pendorong terhadap pengambilan kebijakan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mana pendekatan ini berfokus pada pengamatan bersifat mendalam berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Secara mendalam akan mengeksplorasi melalui pengumpulan informasi secara lengkap lewat pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan saling mempengaruhi antara satu sama lain, namun yang paling menonjol dan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan luar negeri tersebut yaitu sumber sistemik atau yang berasal dari faktor eksternal.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Laut Tiongkok Selatan, *Pivot to Asia*, Kebijakan Luar Negeri, Joe Biden.

Abstract

The United States became involved in the escalating South China Sea conflict in 2021 due to China's aggressive stance in the region. The US engaged through its foreign policy known as Pivot to Asia. This policy was undertaken through the US foreign decision-making process, analyzed by the driving factors behind this policy decision. The type of research used in this study is a qualitative-descriptive approach, which focuses on in-depth observation related to the phenomenon being studied. It will deeply explore through comprehensive information gathering based on a predetermined time frame. The results of this study indicate that the driving factors behind the United States' foreign policy decision in the South China Sea conflict influence each other. However, the most prominent and influential in this foreign policy decision is the systemic sources or those originating from external factors.

Keywords: *United States, South China Sea, Pivot to Asia, Foreign Policy, Joe Biden*

PENDAHULUAN

Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan yang menggiurkan karena letaknya yang strategis dan adanya potensi ekonomi, tak heran kawasan perairan ini menjadi rebutan negara kawasan bahkan negara diluar kawasan Laut Tiongkok Selatan sekalipun seperti negara adidaya Amerika Serikat yang secara letak geografis jelas berada jauh dari kawasan Laut Tiongkok Selatan. Kawasan perairan ini kaya akan sumber daya alam (SDA) terutama mineral, minyak bumi, dan juga gas alam. Diperkirakan adanya cadangan minyak dan gas yang signifikan, setidaknya diperkirakan terdapat 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam yang terdapat di perairan ini (Departemen Luar Negeri AS, 2022).

Tiongkok sendiri mendominasi kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan mengklaim kedaulatan pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan salah satunya berdasarkan hak historis nya, seperti didasari oleh peta kuno dinasti Qing. Tentu klaim ini tidak sah karena tidak berlandaskan dasar hukum dan hal ini bertolak

belakang dengan aturan hukum laut, juga ketentuan hukum internasional yang terkandung dalam Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Hal tersebut memicu kekhawatiran Amerika Serikat terhadap kekuatan militer Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan (Adrianus & Syaroni, 2019).

Kebijakan tersebut yaitu *Pivot to Asia* atau dikenal sebagai *Rebalancing*. Merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Barack Obama, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu memilih Asia sebagai target kebijakannya. Pada bulan November 2011, Obama mengeluarkan kebijakan *Pivot to Asia*. Secara umum, strategi penyeimbangan atau *Rebalancing* di era Presiden Barack Obama lebih berfokus terhadap isu-isu yang lebih struktural terkait dengan dominasi hegemoni AS secara keseluruhan (Adrianus & Syaroni, 2023). Peralihan fokus ke Asia ini guna untuk mengatasi ancaman Tiongkok di Indo-Pasifik dikarenakan kawasan tersebut merupakan tempat dimana sumber daya militer, ekonomi, serta diplomatik AS harus diutamakan (Robert, 2022).

Pivot to Asia era Joe Biden juga lebih mengutamakan aliansi dan juga kemitraan. Implementasi kebijakan *Pivot to Asia* dalam konflik Laut Tiongkok Selatan yaitu diantaranya melalui peningkatan aliansi dan kerja sama bersama sekutu dan mitra baik melalui latihan militer bersama, penjualan senjata, maupun bantuan keamanan. AS juga melakukan pengawasan melalui kemampuan pengawasan dan intelijen untuk memantau aktivitas militer Tiongkok di kawasan tersebut melalui pertukaran informasi dengan sekutu dan mitranya, antara lain Filipina dan Vietnam (Kenneth, 2011). Penguatan aliansi dan kemitraan Biden juga dibangun melalui QUAD (*Quadrilateral Security Dialogue*) terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. QUAD merupakan dialog keamanan strategis yang melibatkan pemimpin negara-negara yang terlibat yang mana dihidupkan pada masa pemerintahan Donald Trump dan dilanjutkan kembali oleh Biden. QUAD dibentuk salah satunya guna menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam menangani isu-isu Laut

Tiongkok Selatan. Hal ini sesuai dengan arah daripada kebijakan luar negeri AS dibawah pemerintahan Presiden Joe Biden yaitu pendekatan multilateral (Natasha, 2024).

Dalam konflik ini, salah satu tujuan Amerika Serikat yaitu untuk memelihara perdamaian dan stabilitas kawasan Laut Tiongkok Selatan, hal ini membuat Amerika Serikat untuk terus memperkuat kebijakannya di wilayah yang penting ini dalam artian Laut Tiongkok Selatan. Menjunjung kebebasan bernavigasi di laut yang berdasarkan dan sesuai dengan hukum internasional, tetap berupaya dalam menjaga arus perdagangan tanpa hambatan apapun dalam menangani urusan sengketa merupakan upaya Amerika Serikat dalam terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2020). Dalam hal keterlibatan Amerika Serikat ini tidak lepas dari kepentingan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Dalam mewujudkan kepentingan nasional suatu negara, diperlukan nya kebijakan luar negeri. Dampak yang dimiliki dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konstelasi internasional tentu besar, dan oleh sebab itu, pemahaman kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam setiap masa pemerintahan akan membantu kita dalam memahami tujuan serta kepentingan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat sendiri (Agastya, 2018: 59-77).

Meski begitu, kebijakan luar negeri AS di bawah kepresidenan Joe Biden akan menggabungkan beberapa dari pendekatan strategis yang diadopsi dari pemerintahan Donald Trump dan Barack Obama serta lebih mengutamakan aliansi dan juga kemitraan baik secara regional maupun global dalam rangka melawan kekuatan dan kehadiran Tiongkok yang semakin besar. Ketika Tiongkok mulai menunjukkan ketertarikan lebih terhadap terhadap isu-isu strategis di kawasan Indo- Pasifik, di saat itu juga mereka mulai mendefinisikan diri kembali menjadi perhatian utama bagi para pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Yudho, 2022: 11-21). Washington menyadari bahwa kepentingan negaranya hanya dapat dimajukan jika berpegang teguh pada kepentingan tersebut, dalam hal ini kepentingan nya di Indo-Pasifik serta memperkuat kawasan itu sendiri bersama dengan sekutu AS

dan mitra terdekatnya (The White House, 2022).

Penelitian ini memiliki fokus yang akan diteliti yaitu faktor-faktor pendorong pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konflik Tiongkok Selatan. Maka, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pengamatan bersifat mendalam berkaitan dengan fenomena tersebut, dimana penulis menghubungkan fakta-fakta dengan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan melalui beberapa data terdahulu, seperti jurnal, artikel, buku, maupun situs pemerintahan yang sudah terverifikasi kredibilitasnya. Menurut Creswell (2014), ia menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan juga memahami makna (*meaning*) yang dianggap oleh sejumlah individu maupun sekelompok orang berasal dari masalah sosial dan juga kemanusiaan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian mengenai kehidupan masyarakat, tingkah laku, sejarah, masalah sosial, maupun fenomena. Penelitian ini nantinya akan mengeksplorasi secara mendalam serta mengumpulkan informasi secara lengkap melalui pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus pada penelitian kualitatif dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, dan juga proses.

Maka dalam hal ini, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan, serta menafsirkan situasi atau keadaan yang ada terkait pembahasan penelitian yaitu faktor-faktor pendorong terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan berdasarkan pada fakta yang ada. Berdasarkan paparan diatas, peneliti menggunakan metode deskriptif dimana metode ini bersifat analitis, eksploratif, eksplanatif, dan evaluatif. karena penelitian ini memiliki fokus terhadap suatu pemecahan masalah bertujuan untuk mengungkap pembahasan mengenai faktor pendorong pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

PEMBAHASAN

a. Kebijakan *Pivot to Asia* pada Masa Pemerintahan Presiden Joe Biden

AS tidak pernah meninggalkan kebijakan *Pivot to Asia*, Presiden Joe Biden secara efektif menghidupkannya kembali dengan menunjuk Kurt Campbell, mantan Asisten Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik di bawah pemerintahan Obama, sebagai Pejabat Seniornya untuk Asia. Campbell menjalankan Strategi Indo-Pasifiknya, yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan termasuk perlunya keseimbangan kekuatan dan tatanan yang diakui oleh negara-negara di kawasan tersebut (Iftikhar, 2022). Kebijakan *Pivot to Asia* atau *Balancing to Asia* pada masa pemerintahan Presiden Joseph. R. Biden dikenal dengan *Repivot to Asia* atau yang berarti menyesuaikan kembali kebijakan luar negeri AS dengan kebijakan ini, dicanangkan oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2011.

Pada dasarnya, kebijakan *Pivot to Asia* ini berarti mengalihkan fokus kembali ke kawasan Asia- Pasifik dari kawasan Timur Tengah ke Asia. Dalam pelaksanaannya, kebijakan *Pivot to Asia* pada era Obama lebih menekankan penguatan kerja sama dengan negara-negara dan forum internasional di kawasan. Hal ini diungkapkan oleh Penasihat Keamanan Nasional, Tom Donilon dalam pidatonya di *The Asia Society* pada tahun 2013. Menurut pernyataan resmi AS mengenai *Pivot to Asia*, ialah konsentrasi arah kebijakan luar negeri AS yang mana berfokus ke kawasan Asia- Pasifik. Kebijakan luar negeri ini merupakan kelanjutan dari kepentingan nasional AS. (Christopher, 2017: 1-64).

Pada umumnya, Kebangkitan kembali kebijakan “*Pivot to Asia*” oleh pemerintahan Joe Biden menandakan kebangkitan kembali pengaruh AS di kawasan Asia Pasifik dan kesiapannya untuk menghadapi ancaman tiongkok, dengan upaya untuk meningkatkan kembali kehadiran militer dan ekonominya guna memajukan kepentingan AS. Peningkatan kehadiran militer lebih dari sekedar pengerahan pasukan, tetapi juga penyediaan bantuan

dalam bentuk aset militer, senjata, dan pelatihan tempur gabungan. Biden meningkatkannya ke tingkat pemimpin, yang mana melibatkan para pemimpin QUAD yang juga sepakat untuk mengadakan pertemuan tahunan dan membentuk kelompok kerja baru (Danah, 2024: 64). Pada pemerintahan Presiden George. W. Bush, Amerika Serikat memang telah memperkuat aliansi nya di kawasan Asia, dan kemudian pemerintahan Obama semakin memperkuatnya dengan menempatkan pasukan dan peralatan militernya di Australia dan Singapura (Congressional Research Service, 2012).

Baik di Asia Timur maupun Laut Tiongkok Selatan, pemerintahan Obama secara resmi menegaskan kenetralannya dalam sengketa teritorial yang melibatkan Tiongkok. Kebijakan luar negeri *Pivot to Asia* dibuat karena berawal dari kondisi kawasan yang sedang berkonflik yaitu Laut Tiongkok Selatan memanas kembali dan terjadinya perdebatan atas klaim teritorial nya yang mana saling bertentangan oleh negara pesisir di LTS. Disamping itu juga, adanya kepentingan vital AS di kawasan ini (Kenneth, 2024). Kebijakan *Repivot to Asia* dalam konteks Laut Tiongkok Selatan merujuk pada upaya pemerintahan Joe Biden untuk memperkuat kembali fokus serta keterlibatan Amerika Serikat di kawasan, terutama dalam menghadapi klaim maritim sepihak Tiongkok yang agresif di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini melibatkan peningkatan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara melalui penguatan aliansi pertahanan dan juga memastikan kebebasan navigasi di perairan yang tengah disengketakan. Langkah- langkah ini bertujuan guna menegaskan kembali komitmen AS terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

b. Faktor-Faktor Internal

Faktor internal mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu hal-hal yang terjadi di dalam negeri AS itu sendiri. Dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS, tidak hanya satu pihak saja yang terlibat. Namun, beberapa pihak memiliki peran

dan pengaruh penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS. Dalam prosesnya, adanya *check and balances* yang telah disediakan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini untuk mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi yang dijadikan prinsip maupun pedoman oleh AS dan dipastikan bahwa tidak adanya individu ataupun kelompok yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Menurut USA Gov, (2023) berikut adalah pihak-pihak yang berperan penting dalam membuat kebijakan luar negeri AS:

1. *Legislative Branch/* Cabang legislatif, terdiri dari Kongres (Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat) atau *House of Representatives*.
2. *Executive Branch/* Cabang Eksekutif, terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, serta kabinet- kabinetnya.
3. *Judicial Branch/* Cabang Yudikatif, cabang ini meliputi Mahkamah Agung dan pengadilan federal lainnya yang bertugas mengevaluasi hukum.

Maka, berkaitan dengan faktor-faktor internal, ketiga cabang diatas bisa dikatakan merupakan bagian dari sumber internal yang mana menjadi pihak yang terlibat dan berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS dengan mempertimbangkan prinsip dan nilai demokrasi. Oleh karenanya, hal ini penting untuk mengetahui dan memahami pihak-pihak yang berperan dan terlibat langsung dalam memutuskan kebijakan luar negeri suatu negara.

c. Presiden Amerika Serikat (*Idiosyncratic Sources*)

Salah satu pihak utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS adalah Presiden Amerika Serikat itu sendiri. Konstitusi AS memberikan wewenang kepada Presiden untuk membuat perjanjian, menerima dan menunjuk duta besar. Wewenang ini membuat Presiden AS memiliki hak untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Presiden juga memiliki kebebasan untuk bernegosiasi mengenai perjanjian yang akan dibuat. Namun, perjanjian tersebut harus diratifikasi oleh dua pertiga anggota senat AS. Presiden mengandalkan klausul lain untuk mendukung tindakan kebijakan luar negeri mereka, khususnya yang memberikan “kekuasaan eksekutif” dan peran “panglima tertinggi angkatan darat dan laut”

pada jabatan tersebut. Hal ini bisa diambil perumpamaan, dari yang diberi kekuasaan eksplisit untuk menunjuk dan menerima duta besar mengalir kewenangan implisit secara umum (*Council Foreign Relations*, 2017).

Dari klausul panglima tertinggi mengalir kekuasaan untuk menggunakan kekuatan militer dan mengumpulkan intelijen asing. Presiden juga menggunakan kewenangan hukum yang telah disahkan oleh Kongres dalam undang-undang yang memberikan kewenangan tambahan kepada eksekutif untuk bertindak atas isu-isu kebijakan luar negeri tertentu. Misalnya, Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (1977) memberi wewenang kepada presiden untuk mengenakan sanksi ekonomi pada entitas asing (*Council Foreign Relations*, 2017). Kekuasaan dan wewenang Presiden AS diatur dalam Konstitusi pasal 2, yang menyatakan bahwa Presiden juga merupakan panglima tertinggi militer. dengan kekuasaan ini, Presiden AS dapat menggunakan kekuatan militer dan mengumpulkan informasi intelijen asing. Dalam peran ini, Presiden bertanggung jawab atas pertahanan militer dan kepentingan negara, serta memiliki hak untuk membuat kebijakan luar negeri (*Council Foreign Relations*, 2017).

Sehubungan dengan *idiosyncratic sources* atau sumber idiosinkratik yang mana bisa dikatakan bahwa sumber ini merupakan dari salah satu faktor internal dengan pertimbangan yang sejalan dengan Rosenau, bahwasannya sikap, persepsi, serta nilai-nilai yang diambil dari pengalaman sejarah merupakan pedoman yang digunakan oleh para pembuat keputusan guna menghadapi situasi dan kondisi eksternal yang menuntut tindakan dan juga keputusan yang didasarkan pada kelompok orientasi tersebut yang mana nantinya membentuk orientasi dan posisi negara dalam politik internasional (Rosenau, 1969). Maka dari itu, pentingnya untuk mencari tahu aspek-aspek tersebut dari Presiden Joe Biden guna mengetahui apakah hal tersebut berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS.

d. Analisis *Idiosyncratic Sources* Joe Biden

Sesuai dengan apa yang sudah disebutkan, bahwa menurut Rosenau sikap, persepsi, serta nilai-nilai merupakan pedoman yang digunakan oleh para pembuat keputusan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Milenia, jika kita melihat lebih dekat, Joe Biden memiliki kepribadian yang terbilang sangat berbeda dan bertolak belakang dengan Donald Trump. Tidak sedikit pihak, terutama negara-negara yang pernah bekerja sama dengan AS, berharap penuh terhadap Joe Biden untuk bisa membawa Amerika Serikat menuju perbaikan. Hal ini dikarenakan AS telah mengalami kemerosotan di berbagai sektor selama kepemimpinan Presiden Donald Trump (Ni Putu, 2023: 481-491).

Lebih lanjut, oleh karena nya bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Amerika Serikat saat ini akan berubah sesuai dengan gaya kepemimpinan Joe Biden. Biden sendiri dikenal sebagai pribadi yang terbuka dan berani untuk siap membawa perubahan dan menghadapi tantangan besar. Joe Biden telah mengalami proses yang panjang dalam dunia politik Amerika Serikat hingga pada saat ini. ia juga pernah menjabat sebagai salah satu anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berlokasi di Washington DC (Ni Putu 2023: 481-491).

Tidak heran selama masa kepemimpinannya, Joe Biden sangat menekankan kepemimpinan Amerika Serikat dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan lingkungan. Ia menyebutkan beberapa yang masuk ke dalam prioritas kebijakan luar negeri AS selama ketika kampanye presiden tahun 2020 seperti membela kepentingan vital Amerika Serikat, mengakhiri perang di Afghanistan dan Timur Tengah, meningkatkan diplomasi, serta memulihkan kemitraan internasional. Biden juga menegaskan bahwa kebijakan luar negerinya sangatlah berbeda dari pendekatan yang dilakukan oleh Trump, terutama dalam hal komitmennya terhadap kerja sama internasional (Rizky, 2022: 88-98). Gaya kepemimpinan Joe Biden seperti ini selaras dengan apa yang ia terapkan di Indo-Pasifik termasuk Laut Tiongkok Selatan, yang mana ia memenuhi komitmennya itu dengan mengutamakan kerja sama serta kembali melibatkan negaranya di kawasan

dengan memulihkan peran kepemimpinan Amerika Serikat dan meningkatkan aliansinya. Biden menyadari betul bahwa negaranya tidak bisa menyelesaikan masalah dunia sendirian, dilihat dari kebijakan luar negeri AS saat ini yaitu multilateralisme.

Keterlibatan AS dalam sistem multilateral menjadi penting dalam meningkatkan dan juga memajukan kebijakan luar negeri AS serta menampilkan AS kembali sebagai pemimpin global dengan melalui kerja sama dengan para pelaku internasional utama, lembaga multilateral memainkan peran penting dalam membentuk masa depan dalam hal keamanan, perdagangan, teknologi, ekonomi, dan juga lingkungan (CSIS, 2024).

e. Wewenang Kongres Amerika Serikat (*Governmental Sources*)

Menurut CFR (2017), konstitusi AS membagi kewenangan hubungan luar negeri kepada cabang eksekutif dan legislatif. Konstitusi sendiri memberikan beberapa kewenangan kepada Kongres seperti regulasi perdagangan luar negeri, dan komando militer diberikan secara eksklusif kepada Presiden. Sementara kewenangan lainnya dibagi di antara keduanya atau tidak diberikan sama sekali. Sering kali banyaknya perdebatan antara peran Presiden dan Kongres dalam urusan luar negeri, serta perihal batasan kewenangan masing-masing. Pada pasal I Konstitusi tercantum kewenangan Kongres dalam urusan luar negeri, termasuknya kewenangan untuk “mengatur perdagangan dengan negara asing,” “menyatakan perang,” “membentuk dan mendukung angkatan darat dan laut.” Konstitusi juga menjadikan dua kewenangan presiden dalam urusan luar negeri serta membuat perjanjian dan menunjuk diplomat bergantung pada persetujuan Senat seperti yang telah dibahas di atas. Adapun peran legislatif menurut USA Gov (2023) meliputi:

- Menyusun rancangan undang-undang
- Mengonfirmasi ataupun menolak nominasi presiden untuk kepala lembaga federal, hakim federal, dan Mahkamah Agung.
- Memiliki kewenangan untuk menyatakan perang.

Setiap cabang pemerintahan dapat mengubah tindakan cabang pemerintahan lainnya:

- Presiden dapat memveto undang-undang yang dibuat oleh Kongres.
- Kongres menyetujui atau menolak calon presiden. Kongres juga dapat memberhentikan Presiden dari jabatannya dalam situasi yang luar biasa besar.
- Para Hakim Mahkamah Agung, yang dicalonkan oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat, dapat membatalkan undang-undang yang tidak konstitusional.

Sebagai contoh, Kongres ke-114 (2015-2017) mengesahkan undang-undang mengenai berbagai topik salah satunya sanksi Korea Utara dan dalam satu contoh penting, anggota parlemen mengesampingkan veto Presiden Barack Obama untuk memberlakukan undang-undang yang mengizinkan korban serangan teroris internasional untuk menuntut pemerintah asing. Diketahui, setelah PD II, Kongres mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947, dan membentuk CIA dan Dewan Keamanan Nasional. Setelah serangan 9/11, Kongres membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Lebih jauh lagi, Kongres memiliki kewenangan untuk membentuk, menghapus atau merestrukturisasi badan-badan cabang eksekutif, yang sering dilakukan setelah konflik atau krisis besar (CFR, 2017).

Bisa dilihat dari studi kasus terbaru yaitu konflik di Timur Tengah, Joe Biden masih menunggu perolehan persetujuan Kongres guna melanjutkan operasi militernya melawan Houthi di Yaman, sesuai dengan kewenangan

tunggal Kongres berdasarkan konstitusi AS untuk menyatakan perang dan mengotorisasi penggunaan kekuatan militer. Konflik Timur Tengah ini tampaknya menghidupkan kembali bentrokan antara presiden yang mana merupakan panglima perang tertinggi, dan Kongres yang memegang wewenang untuk menghentikan dan memulai perang, maupun penggunaan kekuatan militer yang lebih rendah, dan mengontrol pendanaannya (Ellen, 2017). Dalam konteks Indo-Pasifik, Kongres ke-17 memiliki persepsi yang sama dengan cabang eksekutif mengenai Beijing. Pada bulan Juni 2021, Senat mengesahkan RUU Bipartisan Undang-Undang Inovasi dan Persaingan Amerika tahun 2021, yang mana mengklaim bahwa Tiongkok memanfaatkan kekuatan politik, ekonomi, militer, untuk menjadi pesaing global yang strategis dan setara dengan AS. Oleh karena itu Kongres mendesak pemerintahan Biden untuk mengadopsi kebijakan persaingan strategis dengan Republik Rakyat Tiongkok dan mengintegrasikannya ke dalam bagian dari pendekatan strategis yang lebih luas lagi terhadap Indo- Pasifik dan juga dunia (Wei, 2021).

Sejalan dengan konsep kebijakan luar negeri menurut Rosenau, bahwa para pembuat keputusan suatu negara menggunakan strategi yang dituangkan dalam kebijakan luar negeri untuk menghadapi negara lain, yang mana digunakan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dari apa yang telah dilakukan Kongres AS dalam mendesak Biden untuk segera mengadopsi kebijakan persaingan strategis dengan Tiongkok dapat dikatakan sebagai kondisi atau kehidupan internal untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan hidup suatu negara. Hal ini juga sejalan dengan salah satu sumber utama menurut Rosenau, bahwa yang menjadi input dan berkontribusi dalam perumusan kebijakan luar negeri yaitu *Governmental Sources* yang mana merupakan kapabilitas pembuat keputusan dalam menanggapi situasi eksternal (Rosenau, 1969).

f. Opini Publik (*Societal Sources*)

Opini Publik dan demokrasi Amerika sangat berkaitan dan berpengaruh dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Pemimpin pemerintah dan para pejabat negara yang terpilih

berupaya untuk mengikuti mayoritas daripada opini publik itu sendiri. Menurut CFR, yang berperan dan memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara demokrasi seperti AS, terdapat juga peran eksternal yang meliputi: pers, jurnalisme, media sosial, dan opini publik maupun kelompok kepentingan khusus. Opini publik sendiri dapat membentuk dan mempengaruhi prioritas yang diberikan para pembuat kebijakan terhadap berbagai isu (CFR Education, 2023). Sebagai contoh, 71% warga AS mendukung penggunaan kekuatan militer di Irak pada tahun 2003, namun pada tahun 2006 angka ini telah menurun di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi publik tidak selalu mendukung kebijakan pemerintah hanya karena warga Amerika mendukung kebijakan tersebut di awal. Ketidakpuasan publik tersebut menjadi faktor hilangnya kendali Partai Republik atas Kongres dalam pemilihan umum akhir tahun itu karena sebagian berkontribusi terhadapnya (CFR Education, 2023). Maka, dapat dikatakan bahwa memang Presiden memiliki kekuasaan paling tinggi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan luar negeri AS, namun opini publik juga memberikan pengaruh kepada presiden terhadap pengambilan kebijakan luar negeri nya.

Terkait dengan kebijakan *Pivot to Asia* di Laut Tiongkok Selatan, pengaruh daripada pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan luar negeri AS datang dari pengaruh persepsi publik mengenai bahwa Tiongkok merupakan musuh terbesar AS, hal ini adanya peningkatan terhadap hasil survey yang dilakukan Mohamed Younis melalui *Gallup Poll Social Series* meningkat pada tahun 2020.

Gambar 1 Persepsi orang Amerika terhadap musuh besar AS

negara mana di dunia yang Anda anggap sebagai musuh terbesar Amerika Serikat saat ini?

	3-18 Februari 2021	3-18 Februari 2020	Mengubah persis poin
Cina	45	22	+23
Rusia	25	23	-2
Korea Utara/Korea	9	12	-3
Berapa Indonesia lain	4	19	-15
Iran	2	7	-5
Algeria	1	1	angka 0
Amerika Serikat sendiri	1	1	angka 0
Mexico	1	—	+1
Arao Saubi	—	1	-1
Timor Tengah (tidak spesifik)	—	1	-1
Jepang	—	1	-1
Israel	—	2	-2
Sudan	—	1	-1

Sumber: Gallup, 16 Maret 2021.

Jajak pendapat tersebut dilakukan pada tanggal 3-18 Februari, pandangan positif terhadap Tiongkok di kalangan orang dewasa AS mengalami penurunan, angka tersebut menunjukkan 20%. Dan meningkatnya persepsi terhadap Tiongkok sebagai musuh terbesar AS pada tahun 2020. Persepsi mengenai Tiongkok sebagai musuh terbesar AS berada pada titik tertinggi. Kekhawatiran yang terdapat pada sebagian warga Amerika terhadap Tiongkok, yaitu kekuatan ekonominya yang semakin meningkat, hal tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan vital AS oleh sebagian besar warga Amerika. Selain itu juga, separuh dari warga Amerika memandang Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terdepan di dunia saat ini. perkembangan ini membuat kebijakan luar negeri AS terhadap Tiongkok menjadi sangat penting, dikarenakan ketegangan antara kedua negara tersebut semakin meningkat sebelumnya pada masa pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump.

Lebih lanjut lagi, dilihat dari hasil survey yang dilakukan Gallup mengenai posisi AS di dunia, dihubungkan dengan kekuatan militer Tiongkok terhadap ancaman kepentingan vital AS. Mayoritas dari warga AS dilihat dari kurun waktu tahun 2022-2024 bahwa sekitar 63-67% berpendapat bahwa kekuatan militer Tiongkok merupakan ancaman bagi kepentingan vital AS bahkan dalam 10 tahun ke depan (Mohamed, 2021).

Gambar 2 Persepsi orang Amerika terhadap Ancaman Kekuatan

Militer Tiongkok

Sumber: Gallup, 15 Maret 2024.

Next, I am going to read you a list of possible threats to the vital interests of the United States in the next 10 years. For each one, please tell me if you see this as a critical threat, an important but not critical threat, or not an important threat at all. The military power of China.

	Critical	Important	Not important	No opinion
	%	%	%	%
2024 Feb 1-20	63	32	4	1
2023 Feb 1-20	46	27	8	1
2022 Feb 1-17	37	29	4	1
2018 Feb 3-7	41	48	10	2
2014 Feb 6-9	46	41	11	2
2013 Feb 1-10	31	39	9	2
2010 Feb 1-8	46	43	9	2
2004 Feb 9-12	29	46	11	4

Surveyed only
GALLUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, sumber-sumber utama yang digunakan peneliti berdasarkan konsep kebijakan politik luar negeri menurut Rosenau pada penelitian ini, mampu menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor-faktor pendorong terhadap pengambilan kebijakan luar negeri AS. Sumber-sumber tersebut sangat berhubungan dan saling berkaitan dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS didukung dengan adanya rancangan kebijakan AS disesuaikan dengan kepentingan nasional negaranya. Faktor internal ini mampu mendorong para pengambil keputusan dalam konflik yang terjadi di Indo-Pasifik yaitu salah satunya yang terfokuskan pada penelitian ini, sengketa Laut Tiongkok Selatan.

g. Faktor-Faktor Eksternal

Menurut Rosenau (1969), politik luar negeri ini ialah sebagai respons terhadap suatu kejadian dan situasi di luar, merupakan perwujudan dari orientasi, komitmen dan juga tujuan-tujuan spesifik. Maka dalam hal ini, situasi dan kondisi eksternal mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

- Peningkatan Kekuatan serta pengaruh Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan Dorongan dari negara-negara ASEAN

Washington menyadari bahwa kepentingan negaranya hanya dapat dimajukan jika berpegang teguh pada kepentingan tersebut, dalam hal ini kepentingan nya di Indo-Pasifik khusus nya Laut Tiongkok Selatan serta memperkuat

kawasan itu sendiri bersama dengan sekutu AS dan mitra terdekatnya. Menurut Desy (2024), Dalam konteks LTS, Tiongkok telah menunjukkan ancaman terhadap negara-negara ASEAN, terutama yang memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Tiongkok, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Negara-negara ASEAN memandang klaim Tiongkok atas wilayah yang luas di LTS sebagai tindakan ofensif untuk memperluas dominasinya dan menguasai sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut. Peningkatan aktivitas militer Tiongkok di LTS, seperti pembangunan pulau buatan, penempatan senjata, dan pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara ASEAN, membuat negara-negara yang terlibat menganggapnya sebagai bentuk tindakan agresif Tiongkok untuk menguasai wilayah tersebut, yang mana dapat mengancam stabilitas kawasan. ASEAN sendiri merespons tindakan agresif Tiongkok tersebut melalui berbagai pendekatan, termasuk diplomasi dan dialog, dan terus mencari strategi untuk memperkuat pertahanan wilayahnya dengan melibatkan mitra eksternal ASEAN. Keterlibatan kekuatan eksternal seperti AS yang memang merupakan negara *superpower* karena memiliki kekuatan militer nya yang sangat besar dan kuat.

Meskipun AS yang secara geografis terletak jauh dari Laut Tiongkok Selatan dan negara-negara ASEAN, negaranya memiliki kepentingan strategis yang kuat di kawasan Indo-Pasifik. Hubungan dekat AS dengan negara-negara di LTS memberikannya tanggung jawab untuk terus memastikan keamanan wilayah tersebut demi melindungi kepentingan AS. Meskipun AS tidak menghadapi ancaman secara langsung karena jarak geografisnya, namun yang perlu diingat bahwa ASEAN berada dekat dengan Tiongkok, yang mana berpotensi mempengaruhi negara-negara tersebut, sehingga akibatnya akan berdampak dan memiliki pengaruh AS di kawasan tersebut (Desy, 2024).

Dari adanya peningkatan kekuatan Tiongkok melalui

upaya memperkuat klaimnya atas laut tersebut dengan membangun pangkalan militer, menyebabkan negara *superpower* ini mengerahkan kapal perangnya melalui wilayah tersebut dalam apa yang telah di sebutnya misi kebebasan operasi, selama beberapa dekade ini AS selalu berupaya untuk berpatroli dan mempromosikan kebebasan bernavigasi dan penerbangan di jalur tersebut (Matthew, 2021). Hal tersebut merupakan tekanan baik bagi negara-negara di kawasan maupun diluar kawasan seperti AS.

Selaras dengan Kenneth (1979) bahwa, suatu negara berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuatan dikarenakan adanya tekanan dalam sistem internasional, dan agar suatu negara tidak merasa terancam maka sebuah negara berlomba-lomba dalam mengejar dominasinya. Dilihat dari arah kebijakan luar negeri AS dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, *Pivot to Asia* merupakan akses untuk mencapai kepentingan AS di kawasan dengan meningkatkan aliansi dan kerja sama dengan mitra dan negara sekutunya di kawasan tersebut. Dengan adanya peningkatan kekuatan Tiongkok yang dipandang sebagai ancaman atau tekanan oleh AS, negaranya mulai mengedepankan *survival* atau ketahanan negaranya melalui kebijakan luar negeri nya di kawasan.

Di bawah pemerintahan Presiden Trump yang sempat menjauh dari kawasan dibandingkan dengan era kepresidenan Barack Obama, dan sempat menarik diri dari *TPP (Trans-Pacific Partnership)* (Arbatov, 2023). Sehingga hal tersebut menjadi celah untuk Tiongkok bangkit kembali dan memperluas pengaruhnya. Namun, Joe Biden telah menghidupkan kembali "*Pivot to Asia*" yang merupakan kebijakan Barack Obama untuk menyeimbangkan kembali Asia. Keputusan tersebut diambil ketika Donald Trump menarik diri dari TPP atau Kemitraan Trans- Pasifik, tepat setelah menjabat menjadi presiden AS ke-46 (Iftikhar, 2022).

Tidak heran bahwa AS sangat khawatir atas peningkatan kekuatan Tiongkok di kawasan ini, karena Asia merupakan

tempat sumber daya militer, ekonomi, dan diplomatik AS yang harus dijadikan sebagai fokus utama. Maka dari itu, *Pivot to Asia* sangat diperlukan untuk mengatasi ancaman Tiongkok di Indo-Pasifik. Di era pemerintahan Joe Biden, aliansi dengan negara di kawasan seperti Filipina terus ditingkatkan oleh AS yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar bagi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan.

Menurut Wakil Presiden AS, Kamala Harris pada saat kunjungan pertamanya ke Asia Tenggara, ia mengatakan bahwa “AS mempunyai kepentingan yang sangat besar baik dalam hal keamanan maupun dalam mengembangkan dan memperkuat hubungan dengan sekutu di kawasan baik dilakukan untuk membangun ketahanan maupun dalam memperkuat hubungan secara militer” (AP Archive, 2023). Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat tidak ingin kehilangan kredibilitasnya sebagai negara *super power* dan ingin terus mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik salah satunya Laut Tiongkok Selatan. AS ingin menunjukkan bahwa negaranya masih memiliki kekuatan hegemoni di kawasan dan menegaskan keberadaan atau eksistensinya dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan.

Hal tersebut merupakan cerminan bahwa negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. AS sendiri meskipun merupakan negara yang sangat kuat dalam segi militer dan ekonominya, namun Washington menyadari betul bahwa dalam mencapai kepentingan nasionalnya, negaranya tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan mitra dan sekutunya. Dari apa yang telah dibahas melalui pembahasan bab-bab diatas, dapat disimpulkan bahwa terlibatnya AS dalam konflik Laut Tiongkok Selatan dilihat dari posisi strategis LTS itu sendiri, menjadikan kawasan ini menjadi medan persaingan antara AS dan Tiongkok.

Klaim sepihak yang dilakukan Beijing tentu membuat kekhawatiran yang mendalam bagi Washington, bahwa Tiongkok bisa mendapatkan kendali atas LTS. Hal tersebut

menjadi ancaman bagi negara-negara kawasan bahkan di luar kawasan seperti AS yang memiliki kepentingan strategis, politik, dan ekonomi yang besar. Untuk menghadapi dominasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, Amerika Serikat telah memperkuat perannya dalam mengatasi ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan tersebut. Washington melakukannya dengan mengembangkan dan meningkatkan hubungan dengan sekutu dan mitranya di bidang keamanan dan ekonomi. AS berupaya memastikan akses bebas dan terbuka di perairan internasional, menjaga stabilitas regional, dan mendukung keamanan global. Dengan demikian, AS berkomitmen untuk menjaga kebebasan laut dan menegakkan prinsip-prinsip keamanan internasional di Laut Tiongkok Selatan.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, Amerika Serikat memandang Tiongkok sebagai pesaing utama dalam hal militer yang mengancam pengaruh AS di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus menyeimbangkan kekuatan dan mempertahankan dominasinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya faktor eksternal dan internal dalam pengambilan kebijakan *Pivot to Asia* oleh pemerintahan Joe Biden. Faktor internal mencakup *systemic sources*, *societal sources*, *idiosyncratic sources*, *governmental sources*. Semuanya mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Sumber-sumber ini meliputi pengaruh Presiden sebagai kepala negara, Kongres, dan Opini Publik dan *systemic sources* merupakan faktor yang dipengaruhi oleh keadaan eksternal. Faktor eksternal tersebut yaitu peningkatan kekuatan militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, yang mana hal ini memerlukan respon strategis dari AS sendiri untuk menjaga kepentingan nasional dan regional.

Namun, sumber *systemic sources* merupakan faktor yang paling dominan dan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS sendiri, dikarenakan terus mengalami perubahan situasi dan kondisi eksternal seperti meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik khususnya di Laut Tiongkok

Selatan, dikarenakan Tiongkok melakukan tindakan agresif di kawasan Laut Tiongkok Selatan sehingga memicu kekhawatiran dan menimbulkan respon Amerika Serikat. Kebijakan *Pivot to Asia* yang diadopsi oleh pemerintahan Biden menunjukkan komitmen AS untuk mempertahankan pengaruhnya di Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Yudho Priambudi. "Satu Tahun Kemitraan AUKUS: Dampak terhadap Pengelolaan Isu Laut Tiongkok Selatan, dan harapan ke depan." *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 7.2 (2022): 11–21.
- Adrianus Revi Dwiguna and Muhammad Syaroni, "Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Laut China Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia" *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*. Vol .2, No. 2 (2019).
- Alenezi, Danah. "Biden's Strategic Competition Approach Towards China." *Asian Social Science* 20.1 (2024): 64.
- AP Archive. "Vice President Kamala Harris: The AP Interview," 2023. Online.
Internet. 18 Jul. 2024. Available:
<https://www.youtube.com/watch?v=CSd4lnK14ng>.
- Arbatov Institute for US and Canada Studies. "US Policy towards Southeast Asia: from Barack Obama to Joe Biden." *National Center for Biotechnology Information*, 2023. Online.
Internet. 11 Jul. 2024. Available:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10052221/>.
- Bhisa, Natasha Alexandra. "Kebijakan Luar Negeri AS Di Masa Kepemimpinan Joe Biden Melalui The Quad 2.0 Sebagai Pencegahan Dominasi China Di Kawasan Indo-Pasifik 2022-2023." *Jurnal Niara* 17.1 (2024): 106–116.
- Blackwill, Robert D. "The U.S. Pivot to Asia and American Grand Strategy." *Council on Foreign Relations*, 2022. Online.
Internet. 3 Mar. 2023. Available:
<https://www.cfr.org/project/us-pivot-asia-and-american-grand-strategy>.
- CFR Education. "How Do Forces Outside Government Influence Policymaking?," 2023. Online. Internet. 18 Jul. 2024.
Available <https://education.cfr.org/learn/reading/how->

do-forces-outside-government- influence-policymaking.

Congressional Research Service. "Pivot to the Pacific? The Obama Administration's 'Rebalancing' Toward Asia." *CRS Report for congress*, 2012.

Council Foreign Relations. "U.S. Foreign Policy Powers: Congress and the President," 2017. Online. Internet. 14 Jul. 2024. Available: <https://www.cfr.org/backgrounder/us-foreign-policy-powers-congress-and-president>

Council Foreign Relations. "U.S. Foreign Policy Powers: Congress and the President," 2017. Online. Internet. 14 Jul. 2024. Available:<https://www.cfr.org/backgrounder/us-foreign-policy-powers-congress-and-president>.

Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication, Inc. Sorensen, 2014.

CSIS. "The United States and the Multilateral System," 2021. Online. Internet. 18 Jul. 2024. Available: <https://www.csis.org/programs/project-prosperity-and-development/projects/us-soft-power-tools/united-states-and>.

USA Gov, "Branches of the U.S. Government," 2023, online, Internet, 14 Jul. 2024. Available: <https://www.usa.gov/branches-of-government>.

Gilani, Iftikhar. "Biden revives strategic pivot to Asia to contain China's influence." *AA*, 2022. Online. Internet. 13 Jul. 2024. Available: <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/biden-revives-strategic-pivot-to-asia-to-contain-china-s-influence/2601457#>.

Ihsan, Rizky. "Joe Biden's Foreign Policy: What to Expect from the New United States President." *Jurnal Ilmiah Hubungan*

- Internasional* 18.1 (2022): 88–98.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. “Posisi AS Terkait Klaim Maritim di Laut China Selatan.” *U.S. Embassy Jakarta*, 2020.
- Knickmeyer, Ellen. “Middle East conflicts revive clash between the president and Congress over war powers.” *Apnews*, 2024. Online. Internet. 18 Jul. 2024. Available: <https://apnews.com/article/biden-war-powers-israel-gaza-yemen-houthis-c9cfce9a874fbc520ddcc4ef182bf63a>.
- Lieberthal, Kenneth G. “The American Pivot to Asia.” *Brookings*, 2011. Online. Internet. 4 Jul. 2024. Available: <https://www.brookings.edu/articles/the-american-pivot-to-asia/>.
- Ni Putu Wintana Milenia. “Analisis Gaya Kepemimpinan Joe Biden terhadap Kebijakan Amerika Serikat.” *Jurnal Nawala Politika* 1.1 (2023): 481–491.
- Oceans and International Environmental and Scientific Affairs. “Limits in the Seas.” Departemen Luar negeri AS, 2022. Available: <https://id.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/72/LIS150-Klaim-Maritim-di-Laut-China-Selatan-Batas-Batas-di-Lautan.pdf>.
- Rosenau, James N. *International Politics and Foreign Policy*. New York: The Free Press, 1969.
- Shafitri, Desy Nur, Ira Patriani, and Hardi Alunaza SD. “Respon ASEAN atas Keterlibatan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan: Tinjauan Teori Balance of Threat.” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 15.1 (2024): 55–78.
- The White House. “Indo-Pacific Strategy,” 2022. Online. Internet. 3 Mar. 2024. Available: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>.
- USA Gov. “Branches of the U.S. Government,” 2023. Online. Internet. 14 Jul. 2024. Available: <https://www.usa.gov/branches-of-government>.

Waltz, Kenneth N. *Theory of International Politics*. California: Addison-Welsey Publishing Company, 1979.

Wardhana, Agastya. "Grand Strategy Obama: Pivot to Asia." *Jurnal Global dan strategis* 12.1 (2018): 59–77.

Wei, Zongyou, and Yunhan Zhang. "The Biden Administration's Indo-Pacific Strategy and China-U.S. Strategic Competition." *China Quarterly of International Strategic Studies* 7.2 (2021): 157–178.

Willis, Christopher. "The Obama Pivot to Asia: An Analysis of the Fundamentals." *UNF Graduate Theses and Dissertations* (2017): 1–64.

Younis, Mohamed. "New High in Perceptions of China as U.S.'s Greatest Enemy." *Gallup*, 2021. Online. Internet. 18

Jul.

2024.
Available

:

<https://news.gallup.com/poll/337457/new-high-perceptions-china-greatest-enemy.aspx>.